



PERGESERAN PARADIGMA KETUHANAN DAN KEMANUSIAAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM: RELASI TUHAN, AKAL, DAN TANGGUNG JAWAB MANUSIA

Wahyudi Warsito^{1*}, & Arisy Abror Dzurqoni²

^{*1&2}Universitas Islam Pematang

*e-mail: wahyudiwarsito@gmail.com

Submit Tgl: 18-Oktober-2026

Diterima Tgl: 22-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl: 24-Oktober-2026

Abstrak: Pergeseran paradigma ketuhanan dan kemanusiaan dalam pemikiran Islam menghadirkan persoalan mendasar mengenai kedudukan Tuhan, fungsi akal, dan tanggung jawab manusia dalam menentukan arah kehidupan. Persoalan ini tidak sekadar menyangkut perubahan orientasi pemikiran dari teosentrisme menuju antroposentrisme, tetapi juga berkaitan dengan upaya memahami hubungan nilai-nilai ketuhanan dan kebutuhan manusia dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis hubungan kedua paradigma tersebut serta implikasinya terhadap rasionalitas, pertimbangan moral, dan tanggung jawab sosial manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis filosofis dan komparatif terhadap konsep-konsep utama dalam pemikiran Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa teosentrisme memberikan landasan transendental bagi orientasi moral manusia, sedangkan antroposentrisme menekankan peran manusia sebagai subjek yang berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Keduanya perlu dipahami secara kritis agar orientasi ketuhanan tidak mengabaikan persoalan kemanusiaan dan penghargaan terhadap peran akal tidak melepaskan tindakan manusia dari dimensi moral dan spiritual. Dalam perspektif Islam, hubungan Tuhan dan manusia dapat dipahami melalui keselarasan nilai wahyu, penggunaan akal, dan tanggung jawab etis dalam kehidupan sosial. Artikel ini menegaskan bahwa pembaruan pemikiran Islam memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan kesadaran ketuhanan, rasionalitas, dan kemanusiaan tanpa mempertentangkan ketiganya secara mutlak.

Kata Kunci: Teosentrisme; Antroposentrisme; Pemikiran Islam; Rasionalitas; Tanggung Jawab Manusia.

Abstract: The paradigm shift between theocentrism and anthropocentrism in Islamic thought raises fundamental questions concerning the position of God, the function of reason, and human responsibility in shaping the course of life. This issue extends beyond a shift in intellectual orientation from theocentrism to anthropocentrism; it also concerns the relationship between divine values and human needs in responding to the dynamics of modern life. This article aims to critically examine the relationship between these two paradigms and their implications for rationality, moral judgment, and human social responsibility. This study employs a qualitative approach through library research, using philosophical and comparative analyses of key concepts in Islamic thought. The findings indicate that theocentrism provides a transcendental foundation for human moral orientation, whereas anthropocentrism emphasizes the role of human beings as thinking, acting, and responsible agents who must consider the consequences of their actions. Both paradigms require critical examination to ensure that a God-centered orientation does not overlook human concerns and that the recognition of reason does not detach human actions from their moral and spiritual dimensions. From an Islamic perspective, the relationship between God and humanity can be understood through the integration of revealed values, the exercise of reason, and ethical responsibility in social life. This article argues that the renewal of Islamic thought requires an approach capable of integrating awareness of God, rationality, and human dignity without treating these dimensions as inherently incompatible.

Keywords: Theocentrism; Anthropocentrism; Islamic Thought; Rationality; Human Responsibility.

Cara mengutip Warsito, W., & Dzurqoni, A. A. (2026). Pergeseran Paradigma Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pemikiran Islam: Relasi Tuhan, Akal, dan Tanggung Jawab Manusia. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 982–997. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3048>

PENDAHULUAN

Hubungan Tuhan dan manusia merupakan salah satu persoalan fundamental dalam sejarah pemikiran Islam. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keyakinan teologis, tetapi juga menyangkut sumber pengetahuan, dasar penilaian moral, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan sosial. Islam menempatkan tauhid sebagai prinsip utama yang memberikan orientasi spiritual dan moral bagi kehidupan manusia. Namun, keyakinan terhadap Tuhan tidak menghilangkan peran manusia sebagai subjek yang berpikir, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam kehidupan kontemporer, manusia dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, perkembangan teknologi, konflik kepentingan, krisis lingkungan, dan perubahan nilai budaya. Kondisi tersebut menuntut pemahaman keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada kebenaran normatif, tetapi juga mampu mempertimbangkan realitas kehidupan dan konsekuensi tindakan manusia. Oleh karena itu, hubungan antara orientasi ketuhanan dan perhatian terhadap kemanusiaan perlu dikaji secara kritis agar keduanya dapat dipahami secara proporsional dalam pengembangan pemikiran Islam.

Dalam kerangka filsafat, teosentrisme dapat dipahami sebagai orientasi pemikiran yang menempatkan Tuhan sebagai pusat makna, sumber nilai, dan tujuan kehidupan, sedangkan antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam memahami realitas dan menentukan orientasi tindakan. Kedua istilah tersebut memiliki cakupan yang beragam sesuai dengan konteks sejarah dan tradisi intelektual yang menggunakannya. Dalam sejarah pemikiran Barat, Taylor (1989) menjelaskan perubahan pemahaman mengenai diri dan dunia dalam perkembangan modernitas, termasuk perubahan kondisi intelektual yang memungkinkan manusia memaknai kehidupan dengan cara yang berbeda dari masyarakat sebelumnya. Sementara itu, Taylor (2007) menguraikan sekularitas sebagai perubahan kondisi kepercayaan dalam masyarakat modern, bukan semata-mata hilangnya agama dari kehidupan sosial. Pemikiran tersebut relevan untuk memahami bahwa perubahan orientasi manusia tidak selalu berlangsung dalam bentuk penolakan langsung terhadap Tuhan, melainkan juga melalui perubahan cara manusia memahami otoritas, pengetahuan, kebebasan, dan kehidupan bersama. Meskipun demikian, konsep teosentrisme dan antroposentrisme tidak dapat diterapkan secara seragam pada seluruh tradisi pemikiran karena keduanya memiliki variasi dan perkembangan historis masing-masing. Dalam konteks Islam, perhatian terhadap manusia dapat tetap berakar pada keyakinan tentang penciptaan, amanah, keadilan, dan kewajiban moral, sehingga orientasi ketuhanan tidak harus dipertentangkan secara mutlak dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Persoalan utama muncul ketika hubungan kedua paradigma tersebut dipahami sebagai pertentangan yang tidak dapat dipertemukan. Teosentrisme terkadang diasosiasikan dengan kepatuhan terhadap otoritas keagamaan tanpa ruang yang memadai bagi penalaran kritis, sedangkan antroposentrisme kerap dipandang sebagai orientasi yang membebaskan manusia dari seluruh batasan transendental. Penyederhanaan demikian berisiko mengaburkan perbedaan antara ajaran agama, penafsiran manusia terhadap ajaran tersebut, dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Al-Attas (1993), misalnya, menekankan pentingnya pandangan alam Islam dalam membentuk pemahaman tentang pengetahuan, manusia, dan tujuan kehidupan. Perspektif ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari orientasi nilai dan pandangan mengenai hakikat keberadaan. Sebaliknya, pengakuan terhadap dimensi ketuhanan

juga tidak semestinya digunakan untuk menutup evaluasi terhadap keputusan manusia yang mengatasmakan agama. Penafsiran keagamaan tetap melibatkan aktivitas intelektual manusia yang berlangsung dalam konteks sejarah, bahasa, dan kebudayaan tertentu. Dengan demikian, kritik terhadap penerapan suatu pandangan keagamaan tidak dengan sendirinya merupakan penolakan terhadap Tuhan, sebagaimana penghargaan terhadap kemampuan manusia tidak secara otomatis berarti menempatkan manusia di luar tanggung jawab moral dan spiritual.

Peran akal menjadi penting dalam menjelaskan hubungan antara Tuhan dan manusia tersebut. Dalam tradisi filsafat Islam, Al-Farabi mengembangkan pemikiran mengenai hubungan akal, kebahagiaan, dan kehidupan politik, sedangkan Ibn Rushd (2001), dalam pembelaannya terhadap filsafat, menegaskan pentingnya penyelidikan rasional dalam memahami keberadaan. Pemikiran Ibn Rushd memberikan landasan untuk membahas hubungan penalaran filosofis dan keyakinan keagamaan tanpa langsung menganggap keduanya sebagai dua wilayah yang selalu bertentangan. Dalam konteks yang lebih luas, perbedaan pandangan di antara para pemikir Muslim mengenai akal, wahyu, kebebasan, dan kehendak Tuhan memperlihatkan bahwa tradisi intelektual Islam memiliki dinamika argumentasi yang kaya. Akal dapat membantu manusia menguji konsistensi suatu pendapat, memahami hubungan sebab-akibat, menimbang alternatif tindakan, dan mengidentifikasi konsekuensi keputusan. Namun, penggunaan akal juga memerlukan keterbukaan terhadap koreksi karena penalaran manusia dapat dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, kepentingan pribadi, prasangka, dan kondisi sosial. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai rasionalitas dalam pemikiran Islam perlu memperhatikan hubungan antara wahyu sebagai sumber normatif, akal sebagai kemampuan memahami dan menilai, serta pengalaman empiris sebagai bahan untuk mengenali persoalan konkret.

Kebutuhan untuk menghubungkan nilai keagamaan dengan realitas manusia semakin penting ketika pemikiran Islam berhadapan dengan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rahman (1982) menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an melalui gerak pemikiran yang menghubungkan konteks historis pewahyuan dengan persoalan moral dan sosial masa kini. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap teks keagamaan tidak cukup berhenti pada pengenalan bunyi normatif, tetapi perlu mempertimbangkan tujuan moral yang mendasarinya serta relevansinya terhadap situasi yang dihadapi manusia. Dalam arah yang sejalan, Kamali (2008) menjelaskan bahwa maqasid al-shariah memberikan kerangka untuk memahami tujuan hukum Islam dan menilai hubungannya dengan kemaslahatan manusia. Kerangka maqasid memungkinkan pertimbangan terhadap perlindungan kehidupan, akal, keluarga, harta, dan kepentingan mendasar lainnya dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, kemaslahatan tidak dapat diperlakukan sebagai alasan tunggal yang membenarkan setiap tindakan atas nama kepentingan manusia. Penilaiannya perlu disertai pertimbangan keadilan, penghormatan terhadap hak, ketepatan informasi, dan perhatian terhadap kelompok yang berpotensi mengalami kerugian. Dengan demikian, orientasi kemanusiaan dalam Islam tidak semestinya dipahami sebagai penggantian nilai ketuhanan, melainkan sebagai salah satu wilayah penting bagi pengamalan tanggung jawab moral yang berlandaskan nilai keagamaan.

Sejumlah kajian telah memberikan landasan untuk memahami dinamika hubungan agama, akal, dan kemanusiaan. Kajian Rahman (1982) mengenai pendekatan Al-Qur'an menyoroti pentingnya penalaran moral dalam memahami pesan keagamaan dan menghubungkannya dengan persoalan kehidupan. Al-Attas (1993) menempatkan pandangan alam Islam sebagai unsur penting dalam pembentukan pengetahuan dan orientasi hidup manusia. Sementara itu, Kamali (2008) menguraikan maqasid al-shariah sebagai kerangka untuk memahami tujuan syariat dan kemaslahatan. Ketiga perspektif tersebut memberikan kontribusi berbeda: pendekatan moral-hermeneutis, landasan filosofis mengenai pengetahuan, dan kerangka tujuan hukum Islam.

Perbedaan titik tekan itu menunjukkan bahwa relasi Tuhan dan manusia dapat dikaji melalui beragam jalur analisis, mulai dari persoalan epistemologi hingga penerapan nilai dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, diperlukan sintesis konseptual yang secara khusus mengevaluasi hubungan teosentrisme dan antroposentrisme melalui empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu landasan ketuhanan, penggunaan akal, pemeriksaan terhadap fakta, dan tanggung jawab etis atas konsekuensi tindakan. Sintesis tersebut penting agar pembahasan tidak berhenti pada perbandingan definisi atau pertentangan dua istilah, tetapi menghasilkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk menilai persoalan konkret dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis pergeseran paradigma ketuhanan dan kemanusiaan dalam pemikiran Islam, menjelaskan kedudukan teosentrisme dan antroposentrisme, serta menelaah hubungan Tuhan, akal, dan tanggung jawab manusia. Pembahasan diarahkan pada tiga perhatian utama: pertama, asumsi dasar dan karakteristik masing-masing paradigma; kedua, kekuatan dan keterbatasannya dalam menjelaskan persoalan moral dan sosial; serta ketiga, kemungkinan membangun kerangka evaluasi yang menghubungkan nilai keagamaan, rasionalitas, realitas empiris, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis dan komparatif untuk menelaah gagasan para pemikir yang relevan. Artikel ini berangkat dari argumen bahwa perhatian terhadap manusia tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap orientasi ketuhanan, sebagaimana pengakuan terhadap Tuhan tidak semestinya menghilangkan tanggung jawab manusia untuk berpikir kritis dan menilai akibat tindakannya. Dalam perspektif tersebut, nilai ketuhanan memberikan orientasi moral, akal membantu menilai alasan dan alternatif, pemeriksaan fakta memperjelas keadaan yang sesungguhnya, sedangkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan mengarahkan penilaian terhadap dampak keputusan. Integrasi keempat dimensi itu diharapkan memberikan kerangka yang lebih proporsional untuk memahami hubungan Tuhan dan manusia dalam pemikiran Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan filosofis-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman, penafsiran, dan evaluasi kritis terhadap konsep teosentrisme dan antroposentrisme dalam pemikiran Islam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah gagasan para pemikir, argumentasi filosofis, serta prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan hubungan Tuhan, akal, dan tanggung jawab manusia. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengidentifikasi asumsi dasar, landasan epistemologis, dan implikasi moral dari kedua paradigma, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik, kekuatan, dan keterbatasannya. Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan perbedaan konseptual, tetapi juga untuk membangun pemahaman kritis mengenai hubungan nilai ketuhanan dan orientasi kemanusiaan dalam kehidupan kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya pemikir Islam yang relevan dengan persoalan akal, wahyu, manusia, dan tanggung jawab moral, terutama pemikiran Al-Ghazali, Ibn Rushd, Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan Fazlur Rahman. Karya-karya tersebut dipilih karena memberikan perspektif yang beragam mengenai hubungan keyakinan keagamaan, penalaran rasional, pandangan tentang manusia, dan penerapan nilai Islam. Sumber sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas teosentrisme, antroposentrisme, filsafat Islam, etika, maqasid al-shariah, serta dinamika pemikiran Islam kontemporer. Literatur yang relevan digunakan untuk memetakan perkembangan wacana, mengidentifikasi perbedaan argumentasi, dan memperkuat

analisis terhadap persoalan yang dikaji. Pemilihan sumber mempertimbangkan relevansi substantif, kejelasan identitas bibliografis, kredibilitas penerbit atau jurnal, serta kontribusinya terhadap tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Penelusuran diarahkan pada publikasi yang membahas pengertian dan perkembangan teosentrisme serta antroposentrisme, hubungan akal dan wahyu dalam tradisi Islam, serta tanggung jawab moral manusia dalam menghadapi persoalan sosial. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema, keterandalan sumber, dan kecukupan informasi untuk mendukung analisis konseptual. Selanjutnya, bahan pustaka dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi gagasan utama, konsep kunci, asumsi filosofis, persamaan dan perbedaan argumentasi, serta implikasi etis yang terkandung di dalamnya. Data yang telah dipilih dikelompokkan ke dalam empat dimensi analisis, yaitu landasan ketuhanan, penggunaan akal, pertimbangan terhadap realitas faktual, dan tanggung jawab moral-sosial. Pengelompokan ini berfungsi sebagai kerangka kerja analitis untuk menjaga konsistensi pembahasan dan menghubungkan berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah analisis konseptual, yaitu menjelaskan makna teosentrisme dan antroposentrisme serta mengidentifikasi asumsi mengenai kedudukan Tuhan dan manusia dalam masing-masing paradigma. Tahap kedua adalah analisis komparatif-kritis, yaitu membandingkan kedua paradigma berdasarkan orientasi nilai, kedudukan akal, cara memahami persoalan konkret, dan konsekuensi moral dari penerapannya. Pada tahap ini, analisis tidak menempatkan teosentrisme dan antroposentrisme sebagai dua kutub yang secara mutlak saling meniadakan, tetapi menguji kemungkinan dan batas hubungan keduanya dalam kerangka pemikiran Islam. Tahap ketiga adalah sintesis normatif, yaitu merumuskan kerangka evaluasi yang menghubungkan nilai ketuhanan, penalaran rasional, pemeriksaan fakta, serta pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Sintesis tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana orientasi ketuhanan dapat memberikan dasar moral, sementara akal dan pemahaman terhadap realitas membantu manusia mengambil keputusan secara kritis dan bertanggung jawab.

Untuk menjaga ketepatan interpretasi, penelitian ini membedakan antara pandangan yang secara eksplisit dikemukakan oleh sumber dan kesimpulan analitis yang dikembangkan oleh peneliti. Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Rushd, al-Attas, dan Rahman dipahami dalam konteks argumentasi serta latar intelektual masing-masing, sehingga tidak diperlakukan sebagai pandangan yang seragam atau sebagai dukungan langsung terhadap seluruh kerangka analisis artikel. Demikian pula, literatur tentang fikih, maqasid al-shariah, etika, dan perubahan sosial digunakan sesuai dengan ruang lingkup argumentasinya. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan konteks historis dan konseptual agar perbedaan tradisi pemikiran tidak disederhanakan menjadi pertentangan antara agama dan akal, atau antara kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia. Ketelitian dalam penggunaan sumber juga dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara klaim yang dikemukakan, isi rujukan, dan konteks pembahasannya.

Sebagai penelitian berbasis kepustakaan, hasil analisis ini memiliki batas pada tingkat konseptual, filosofis, dan normatif. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur secara empiris pandangan masyarakat Muslim mengenai teosentrisme dan antroposentrisme, ataupun membuktikan hubungan sebab-akibat antara paradigma tertentu dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan merupakan sintesis argumentatif berdasarkan literatur yang dianalisis, bukan generalisasi empiris terhadap seluruh tradisi atau komunitas Muslim. Penelitian lanjutan melalui studi kasus, wawancara, atau penelitian lapangan dapat dilakukan untuk menguji bagaimana hubungan nilai ketuhanan, penggunaan akal, dan tanggung jawab manusia diwujudkan

dalam praktik pendidikan, kebijakan publik, kehidupan keagamaan, dan interaksi sosial. Dengan batasan tersebut, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang terarah, kritis, dan proporsional mengenai dinamika paradigma ketuhanan dan kemanusiaan dalam pemikiran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Paradigma Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pemikiran Islam

Paradigma merupakan kerangka pemikiran yang memengaruhi cara seseorang memahami realitas, menentukan sumber pengetahuan, menetapkan dasar penilaian moral, dan mengambil keputusan. Dalam konteks pemikiran Islam, teosentrisme dan antroposentrisme dapat digunakan untuk menjelaskan dua orientasi yang berbeda dalam memahami hubungan Tuhan dan manusia. Teosentrisme menempatkan Tuhan sebagai pusat orientasi nilai dan tujuan kehidupan, sedangkan antroposentrisme menekankan manusia, martabat, hak, kebutuhan, dan tanggung jawabnya sebagai perhatian utama dalam memahami realitas. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut tidak boleh dipahami secara kaku karena masing-masing memiliki keragaman pengertian dan penerapan. Perbedaan keduanya perlu dianalisis berdasarkan asumsi filosofis, sumber legitimasi nilai, penggunaan akal, serta implikasi etisnya dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif Islam, orientasi teosentris berkaitan erat dengan tauhid, penghambaan, amanah, dan tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan. Keyakinan terhadap Tuhan memberikan landasan moral bahwa tindakan manusia tidak semata-mata dinilai berdasarkan keuntungan praktis, kepuasan pribadi, atau keberhasilan material, tetapi juga berdasarkan pertanggungjawaban etis dan spiritual. Al-Attas (1993) menekankan pentingnya pandangan alam Islam dalam memahami pengetahuan, manusia, dan tujuan kehidupan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan tindakan manusia tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari orientasi nilai yang mendasarinya. Namun, penerapan nilai ketuhanan dalam persoalan konkret tetap membutuhkan pemahaman terhadap teks, konteks, dan kondisi kehidupan. Penafsiran yang dilakukan manusia tidak identik dengan pengetahuan Tuhan, sehingga pemahaman keagamaan tetap memerlukan kehati-hatian dan evaluasi kritis.

Sementara itu, antroposentrisme menempatkan pengalaman, martabat, hak, dan kepentingan manusia sebagai pertimbangan penting dalam memahami serta mengevaluasi suatu tindakan. Dalam pemikiran hukum Islam, perhatian terhadap manusia dapat terlihat melalui pembahasan mengenai hak, keadilan, dan kemaslahatan. Wijaya (2020), misalnya, mengkaji orientasi antroposentris dalam Islam melalui perbandingan penalaran yang menekankan kewajiban atau *taklif* dengan penalaran yang lebih menonjolkan hak manusia. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa perubahan titik tekan dalam penalaran dapat memengaruhi cara suatu persoalan keagamaan dipahami dan diterapkan. Namun, perhatian terhadap hak manusia tidak harus dimaknai sebagai pemisahan manusia dari nilai ketuhanan. Sebaliknya, perhatian terhadap martabat dan kesejahteraan manusia dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana nilai moral diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Untuk memahami hubungan kedua paradigma tersebut secara proporsional, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan.

1. Landasan nilai. Teosentrisme menekankan orientasi ketuhanan sebagai dasar moral, sedangkan antroposentrisme menyoroti kebutuhan untuk menjelaskan nilai melalui perhatian terhadap manusia dan kehidupannya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan titik tekan argumentasi, bukan selalu pertentangan mutlak antara agama dan kemanusiaan.
2. Peran akal dan penafsiran. Kedua paradigma memerlukan proses berpikir ketika diterapkan pada persoalan konkret. Nilai keagamaan perlu dipahami melalui penafsiran, sedangkan

pertimbangan kemanusiaan membutuhkan alasan yang jelas, informasi yang memadai, dan pengujian terhadap kemungkinan dampak tindakan.

3. Tanggung jawab etis. Orientasi ketuhanan mengingatkan manusia akan pertanggungjawaban moral dan spiritual, sedangkan orientasi kemanusiaan menekankan akibat tindakan terhadap individu dan masyarakat. Keduanya dapat dianalisis secara berdampingan untuk menilai apakah suatu keputusan memiliki dasar moral yang jelas dan memperhatikan pihak-pihak yang terdampak.

Dengan demikian, persoalan mendasar bukan hanya menentukan apakah Tuhan atau manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian, melainkan menilai bagaimana nilai, pengetahuan, dan tanggung jawab dihubungkan dalam pengambilan keputusan. Sebuah tindakan yang mengatasnamakan agama tetap perlu dievaluasi apabila menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana tindakan yang mengatasnamakan kepentingan manusia perlu dikritisi apabila mengabaikan hak pihak lain. Mahtir et al. (2025), melalui kajian mengenai pemikiran Ismail Raji al-Faruqi dan Hasan Hanafi, turut menunjukkan adanya upaya menghubungkan tauhid dengan persoalan kemanusiaan dalam pemikiran Islam kontemporer. Oleh karena itu, hubungan teosentrisme dan antroposentrisme lebih produktif dikaji sebagai persoalan filosofis dan etis daripada dipahami sebagai pilihan mutlak antara Tuhan dan manusia.

Faktor Historis dan Intelektual dalam Perubahan Paradigma

Perubahan orientasi pemikiran tidak berlangsung dalam ruang kosong. Perkembangan pengetahuan, perubahan sosial, dinamika kelembagaan, dan perdebatan filosofis dapat memengaruhi cara manusia memahami Tuhan, alam, dan dirinya sendiri. Akan tetapi, pergeseran dari teosentrisme menuju antroposentrisme tidak dapat dijelaskan melalui satu pola sejarah yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Perkembangan pemikiran Eropa memiliki konteks yang berbeda dari perkembangan intelektual Islam, sehingga keduanya perlu dianalisis secara proporsional.

1. Perubahan Intelektual dalam Sejarah Eropa

Dalam sejarah Eropa, humanisme Renaisans memperluas perhatian terhadap pendidikan, bahasa, karya klasik, kebajikan, dan kemampuan manusia dalam kehidupan sosial. Perkembangan tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan penolakan terhadap agama karena banyak pemikir pada masa itu tetap mempertahankan keyakinan religius. Perubahan lebih tepat dipahami sebagai perkembangan cara manusia mempelajari teks, memahami alam, dan menilai otoritas pengetahuan.

Del Soldato (2023) membahas keragaman tradisi filsafat alam pada masa Renaisans yang memperlihatkan interaksi antara berbagai pendekatan filosofis dan teologis. Sementara itu, Brooke (1991) menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam sejarah tidak selalu berupa konflik, tetapi juga mencakup interaksi, penyesuaian, dan perdebatan intelektual. Perkembangan pengamatan empiris, matematika, instrumen ilmiah, dan lembaga pengetahuan turut mengubah cara sebagian pemikir menguji penjelasan mengenai alam. Ketika temuan baru tidak sesuai dengan pandangan yang telah mapan, muncul kebutuhan untuk memeriksa kembali asumsi dan metode yang digunakan.

Dari perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan paradigma tidak sekadar menyangkut pergantian pusat perhatian dari Tuhan menuju manusia. Perubahan juga berkaitan dengan metode pengetahuan, legitimasi otoritas, dan cara membangun argumentasi. Pengalaman Eropa memberikan pelajaran mengenai pentingnya keterbukaan terhadap bukti dan evaluasi kritis, tetapi tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menjelaskan perkembangan pemikiran Islam.

2. Modernitas dan Pembaruan Pemikiran Islam

Dalam tradisi Islam, penggunaan akal telah berkembang melalui ilmu kalam, filsafat, fikih, dan usul fikih jauh sebelum munculnya modernitas. Berbagai tradisi tersebut memuat perdebatan mengenai hubungan akal dan wahyu, penafsiran teks, kebebasan manusia, serta penerapan norma keagamaan. Oleh karena itu, meningkatnya perhatian terhadap manusia dalam pemikiran Islam kontemporer tidak tepat dipahami sebagai penemuan rasionalitas yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Perubahan lebih berkaitan dengan perkembangan metodologi, perubahan konteks sosial, dan munculnya persoalan baru yang menuntut penafsiran serta argumentasi yang relevan.

Junaedi (2018) membahas konstruksi pemikiran fikih Indonesia dengan memperhatikan konteks sosial-budaya dan perkembangan pemikiran. Wijaya (2020) menelaah orientasi antroposentris dalam Islam melalui persoalan penalaran hukum dan hak manusia, sedangkan Mahtir et al. (2025) membahas rekonstruksi pemahaman tauhid melalui pemikiran al-Faruqi dan Hasan Hanafi. Ketiga kajian tersebut memiliki fokus yang berbeda, tetapi sama-sama relevan untuk memahami keragaman cara pemikiran Islam merespons persoalan kemanusiaan.

Haryadi dan Burhanuddin (2026) juga membahas transformasi metodologi ilmu kalam dalam konteks modernitas. Perspektif tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa perubahan pemikiran keagamaan dapat berlangsung melalui pembaruan pendekatan epistemologis dan metodologis tanpa harus menghapus keyakinan terhadap Tuhan. Meskipun demikian, setiap bentuk pembaruan tetap memerlukan evaluasi kritis terhadap alasan, metode, dan implikasinya.

Dengan demikian, perhatian terhadap kemanusiaan dapat berkembang dari dalam tradisi pemikiran Islam melalui penafsiran, perdebatan intelektual, dan respons terhadap persoalan sosial. Namun, tidak setiap gagasan yang disebut sebagai pembaruan otomatis lebih tepat atau lebih adil. Penilaian tetap perlu memperhatikan apa yang diubah, prinsip apa yang dipertahankan, alasan apa yang digunakan, dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi tanggung jawab manusia.

3. Implikasi Sejarah bagi Evaluasi Filosofis

Perbandingan sejarah Eropa dan pemikiran Islam menunjukkan bahwa perubahan paradigma harus dipahami berdasarkan konteks intelektualnya. Perkembangan filsafat alam Eropa tidak dapat secara langsung dijadikan bukti mengenai arah perkembangan seluruh pemikiran Islam. Sebaliknya, dinamika intelektual Islam juga tidak harus dipahami sebagai pengulangan pengalaman sejarah Eropa.

Implikasi utamanya adalah bahwa sejarah berfungsi untuk menjelaskan latar belakang perubahan, bukan untuk membenarkan secara otomatis salah satu paradigma. Evaluasi filosofis tetap diperlukan untuk menilai apakah perubahan tersebut memperbaiki kualitas penalaran, memperjelas landasan moral, memperhatikan fakta, dan menghasilkan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, pertanyaan penting bukan sekadar apakah perhatian terhadap manusia semakin meningkat, melainkan apakah perubahan itu mampu menjawab persoalan kehidupan tanpa mengabaikan dimensi ketuhanan dan tanggung jawab moral.

Kekuatan dan Keterbatasan Paradigma Teosentris dan Antroposentris

Evaluasi terhadap teosentrisme dan antroposentrisme perlu mempertimbangkan kontribusi serta keterbatasan masing-masing. Keduanya menyediakan titik tekan yang berbeda dalam memahami nilai dan tindakan, tetapi keduanya juga dapat menghadapi persoalan ketika diterapkan tanpa argumentasi yang memadai. Oleh karena itu, penilaian tidak cukup dilakukan berdasarkan label paradigma, tetapi perlu melihat cara suatu pandangan dibangun, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan.

1. Kekuatan dan Keterbatasan Paradigma Teosentris

Kekuatan paradigma teosentris terletak pada kemampuannya memberikan landasan moral yang tidak sepenuhnya bergantung pada kepentingan pribadi. Dalam perspektif Islam, keyakinan terhadap Tuhan mengingatkan manusia bahwa kekuasaan, pengetahuan, harta, dan kebebasan mengandung tanggung jawab. Keberhasilan praktis tidak selalu menjadi ukuran kebenaran moral, sebab tindakan yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu tetap dapat dinilai keliru apabila bertentangan dengan keadilan dan amanah.

Orientasi ketuhanan juga dapat memberikan dasar untuk mengkritik keserakahan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Manusia tidak dipandang memiliki kebebasan tanpa batas, tetapi bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan kehidupannya. Dalam konteks tersebut, teosentrisme berpotensi mendorong kepedulian sosial apabila nilai keagamaan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan nyata.

Namun, orientasi teosentris tidak menjamin bahwa setiap keputusan yang mengatasnamakan Tuhan pasti benar. Penerapan nilai keagamaan selalu melibatkan manusia yang menafsirkan teks, memilih argumentasi, dan menentukan tindakan. Proses tersebut dapat dipengaruhi keterbatasan pengetahuan, kepentingan kelompok, kebiasaan, atau relasi kekuasaan. Apabila penafsiran manusia disamakan sepenuhnya dengan kehendak Tuhan, ruang untuk melakukan koreksi dapat menyempit dan kritik terhadap suatu keputusan berisiko dianggap sebagai penolakan terhadap agama.

Keterbatasan lainnya muncul ketika kepatuhan dipahami tanpa pemeriksaan terhadap konteks dan konsekuensi tindakan. Persoalan sosial modern sering membutuhkan data, keahlian, dan pemahaman tentang dampak yang tidak langsung terlihat. Niat religius yang baik tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan keputusan apabila informasi yang digunakan keliru atau kepentingan kelompok rentan tidak diperhitungkan.

Oleh karena itu, kekuatan teosentrisme perlu disertai kesadaran bahwa penafsiran dan penerapan nilai tetap membutuhkan tanggung jawab intelektual. Landasan ketuhanan dapat memberikan arah moral, tetapi manusia tetap perlu menjelaskan alasan tindakannya, memeriksa keadaan yang dihadapi, dan bersedia memperbaiki keputusan apabila ditemukan kekeliruan.

2. Kekuatan dan Keterbatasan Paradigma Antroposentris

Kekuatan paradigma antroposentris terletak pada perhatiannya terhadap martabat, hak, kebutuhan, dan pengalaman manusia. Orientasi ini mendorong evaluasi terhadap dampak nyata suatu kebijakan atau penafsiran, sehingga pembahasan tidak berhenti pada rumusan normatif yang abstrak. Dalam konteks pemikiran hukum Islam, perhatian terhadap hak manusia dapat membantu memperluas analisis mengenai hubungan kewajiban, keadilan, dan kondisi sosial (Wijaya, 2020).

Antroposentrisme juga mendorong penggunaan pengetahuan empiris untuk memahami persoalan konkret. Keputusan mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan membutuhkan informasi yang memadai agar tujuan yang baik tidak menghasilkan akibat yang justru merugikan. Perhatian terhadap konteks sosial, sebagaimana menjadi salah satu aspek pembahasan Junaedi (2018), menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keadaan masyarakat dalam pengembangan pemikiran hukum Islam.

Meskipun demikian, antroposentrisme memiliki keterbatasan apabila kepentingan manusia dijadikan satu-satunya ukuran tanpa penjelasan mengenai keadilan dan batas moral. Kepentingan manusia tidak selalu sejalan. Keputusan yang menguntungkan mayoritas belum tentu adil apabila menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi kelompok minoritas atau kelompok rentan. Demikian pula, manfaat jangka pendek dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial yang lebih besar pada masa mendatang.

Antroposentrisme juga perlu menghindari anggapan bahwa manfaat praktis secara otomatis menentukan kebenaran moral. Data dapat menjelaskan kondisi dan memperkirakan akibat, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana manfaat dan kerugian seharusnya dibagikan. Penilaian tetap membutuhkan prinsip yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak.

Dengan demikian, perhatian terhadap manusia perlu dilengkapi landasan normatif dan penalaran yang dapat diuji. Kepentingan manusia tidak cukup hanya dinyatakan sebagai tujuan, tetapi perlu dijelaskan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung kerugian, dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

3. Perbandingan Kritis Kedua Paradigma

Perbandingan antara teosentrisme dan antroposentrisme memperlihatkan bahwa keduanya memiliki kekuatan yang berbeda. Teosentrisme menekankan landasan transendental dan pertanggungjawaban moral, sedangkan antroposentrisme menonjolkan martabat manusia, kebutuhan konkret, dan dampak tindakan. Perbedaan ini menjadi penting ketika suatu keputusan harus mempertimbangkan prinsip moral sekaligus keadaan faktual.

Teosentrisme perlu dikritisi ketika klaim otoritas keagamaan digunakan untuk menghindari pemeriksaan terhadap penafsiran atau akibat keputusan. Antroposentrisme perlu dikritisi ketika kepentingan manusia tertentu dijadikan ukuran tunggal tanpa mempertimbangkan hak pihak lain dan tanggung jawab jangka panjang. Dengan demikian, evaluasi yang seimbang tidak berarti menghapus perbedaan kedua paradigma, melainkan menilai bagaimana masing-masing memberikan alasan dan menghadapi keterbatasannya.

Dalam perspektif Islam, hubungan ketuhanan dan kemanusiaan dapat dianalisis melalui tanggung jawab manusia untuk menerapkan nilai moral secara tepat. Nilai ketuhanan memberikan orientasi, sedangkan perhatian terhadap manusia membantu memperjelas persoalan yang harus diselesaikan. Keduanya memerlukan penggunaan akal dan pemeriksaan fakta agar keputusan tidak hanya kuat dalam pernyataan normatif, tetapi juga bertanggung jawab dalam penerapannya.

Relasi Tuhan, Akal, Wahyu, dan Otonomi Manusia

Hubungan Tuhan dan manusia dalam pemikiran Islam tidak dapat dipahami secara memadai apabila akal dan wahyu selalu ditempatkan sebagai dua kekuatan yang saling bertentangan. Tradisi intelektual Islam memperlihatkan keragaman pandangan mengenai fungsi akal, otoritas wahyu, dan kemampuan manusia memahami realitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai rasionalitas perlu memperhatikan konteks pemikiran masing-masing tokoh serta persoalan yang sedang mereka bahas.

1. Akal dan Wahyu dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rushd

Al-Ghazali dikenal melalui kritiknya terhadap sejumlah pandangan filosofis, khususnya dalam persoalan metafisika yang dinilainya tidak memiliki pembuktian memadai. Namun, pemikirannya tidak tepat disederhanakan sebagai penolakan total terhadap akal dan logika. Griffel (2026) membahas hubungan al-Ghazali dengan tradisi filsafat serta memperlihatkan perlunya membedakan kritiknya terhadap ajaran tertentu dari sikap terhadap penalaran secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdebatan tentang akal dalam tradisi Islam melibatkan pertanyaan mengenai batas pengetahuan dan kekuatan metode pembuktian.

Ibn Rushd (2001), melalui *The Decisive Treatise*, membahas hubungan filsafat dan syariat serta pentingnya penalaran demonstratif dalam penyelidikan intelektual. Pemikirannya menunjukkan bahwa penggunaan akal dapat dibahas sebagai bagian dari upaya memahami realitas dan menjelaskan hubungan antara penyelidikan filosofis dan agama. Perbedaan

pandangan antara al-Ghazali dan Ibn Rushd memperlihatkan keragaman pendekatan dalam tradisi filsafat Islam, sehingga hubungan akal dan wahyu tidak dapat diringkas menjadi pertentangan sederhana antara iman dan rasionalitas.

2. Akal sebagai Dasar Penilaian dan Tanggung Jawab

Akal memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami persoalan, menilai konsistensi argumentasi, membandingkan alternatif, dan memperkirakan akibat tindakan. Dalam kehidupan sosial, kemampuan tersebut diperlukan agar keputusan tidak hanya bertumpu pada kebiasaan, kepentingan pribadi, atau klaim otoritas yang belum diperiksa. Penggunaan akal juga menuntut kesediaan mengakui keterbatasan informasi dan menerima kemungkinan bahwa kesimpulan yang dibuat perlu diperbaiki.

Dalam kerangka pemikiran Islam, penggunaan akal tidak harus berarti kebebasan tanpa batas dari nilai agama. Otonomi manusia dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menimbang alasan, memilih tindakan, dan mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Manusia tetap terikat pada tanggung jawab moral, tetapi tanggung jawab tersebut justru menuntut keterlibatan aktif dalam proses berpikir dan mengambil keputusan.

3. Menghubungkan Nilai, Fakta, dan Tindakan

Nilai moral dan fakta empiris memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Nilai moral membantu menentukan tujuan yang patut diperjuangkan, sedangkan fakta memberikan informasi mengenai kondisi yang dihadapi dan kemungkinan akibat dari suatu tindakan. Akal berperan menghubungkan keduanya melalui penalaran yang dapat diperiksa dan dikritik.

Sebagai contoh, prinsip keadilan dapat menjadi dasar moral bagi suatu kebijakan pendidikan. Namun, untuk menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar adil, diperlukan informasi tentang akses peserta didik, distribusi sumber daya, hambatan yang dihadapi kelompok tertentu, dan dampak kebijakan terhadap proses pembelajaran. Prinsip moral saja tidak menyediakan seluruh informasi tersebut, sedangkan data statistik saja tidak otomatis menentukan pilihan yang paling adil. Oleh karena itu, pengambilan keputusan memerlukan keterpaduan antara landasan nilai, penalaran, dan pemeriksaan terhadap realitas.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia tidak berhenti pada pengakuan terhadap nilai keagamaan, tetapi mencakup usaha memahami dan menerapkannya secara tepat. Dengan demikian, akal dan wahyu dapat dikaji melalui fungsi masing-masing tanpa harus menghilangkan perbedaan kedudukan keduanya dalam tradisi Islam.

Evaluasi Kritis terhadap Pergeseran Paradigma Ketuhanan dan Kemanusiaan

Pergeseran dari teosentrisme menuju antroposentrisme perlu dinilai berdasarkan perubahan cara memahami nilai, pengetahuan, dan tanggung jawab manusia. Pergeseran tersebut tidak selalu berarti bahwa orientasi ketuhanan ditinggalkan sepenuhnya. Dalam sebagian pemikiran Islam kontemporer, perhatian terhadap kemanusiaan justru digunakan untuk menjelaskan konsekuensi etis dari keyakinan tauhid dalam kehidupan sosial (Mahtir et al., 2025). Namun, hubungan tersebut tetap memerlukan evaluasi agar perhatian terhadap manusia tidak menjadi pembenaran bagi kepentingan tertentu yang mengabaikan nilai moral.

1. Evaluasi terhadap Landasan Moral

Landasan moral merupakan titik awal untuk menilai arah suatu keputusan. Dalam perspektif Islam, nilai ketuhanan memberikan orientasi mengenai kewajiban, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Akan tetapi, penerapan nilai tersebut perlu disertai penjelasan tentang bagaimana prinsip yang diyakini diterjemahkan ke dalam tindakan.

Klaim bahwa suatu keputusan berlandaskan agama belum cukup untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Diperlukan pemeriksaan terhadap dasar penafsiran, konsistensi alasan, dan

relevansinya dengan persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, evaluasi terhadap suatu penerapan nilai tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap Tuhan, melainkan dapat menjadi bagian dari tanggung jawab manusia dalam memahami ajaran secara cermat.

2. Evaluasi terhadap Penalaran dan Fakta

Keputusan yang bertanggung jawab memerlukan alasan yang jelas dan informasi yang memadai. Penalaran membantu menilai hubungan antara prinsip, asumsi, dan kesimpulan, sedangkan pemeriksaan fakta membantu menentukan apakah gambaran mengenai situasi yang dihadapi sesuai dengan kenyataan. Kedua unsur tersebut diperlukan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada niat baik atau dugaan yang belum teruji.

Dalam persoalan sosial, misalnya, kebijakan yang diklaim memberikan manfaat bagi masyarakat perlu dievaluasi berdasarkan bukti mengenai pelaksanaan dan dampaknya. Apabila suatu program ternyata merugikan kelompok tertentu, penilaian perlu mempertimbangkan apakah kerugian tersebut dapat dicegah dan apakah tersedia alternatif yang lebih baik. Proses ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap fakta bukan pengganti nilai moral, tetapi bagian dari upaya menerapkan nilai secara bertanggung jawab.

3. Evaluasi terhadap Keadilan dan Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan pertimbangan penting dalam pembahasan tujuan hukum Islam. Kamali (2008) menjelaskan maqasid al-shariah sebagai kerangka untuk memahami tujuan syariat dan hubungannya dengan kemaslahatan manusia. Namun, penggunaan kemaslahatan dalam evaluasi keputusan memerlukan penjelasan mengenai pihak yang memperoleh manfaat, pihak yang menanggung kerugian, serta dampak jangka pendek dan panjang.

Keputusan yang memberikan keuntungan kepada mayoritas belum tentu adil apabila mengorbankan hak dasar kelompok minoritas. Sebaliknya, keputusan yang melindungi kepentingan individu juga perlu mempertimbangkan kewajiban dan dampaknya terhadap kehidupan bersama. Oleh karena itu, kemaslahatan perlu dianalisis bersama dengan keadilan, penghormatan terhadap hak, distribusi manfaat dan beban, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, pergeseran paradigma dapat dinilai konstruktif apabila meningkatkan kemampuan manusia memahami persoalan, memperbaiki kualitas argumentasi, dan menerapkan nilai moral secara adil. Sebaliknya, pergeseran patut dikritisi apabila hanya mengganti satu klaim otoritas dengan kepentingan manusia tertentu tanpa alasan yang kuat dan tanpa mekanisme koreksi. Penilaian ini memungkinkan pembahasan teosentrisme dan antroposentrisme dilakukan secara kritis tanpa menyamakan keduanya atau mempertentangkannya secara mutlak.

Sintesis Konseptual dan Implikasi bagi Kehidupan Kontemporer

Berdasarkan pembahasan historis, filosofis, dan etis, artikel ini mengajukan kerangka evaluasi yang menghubungkan landasan ketuhanan, penalaran rasional, pemeriksaan fakta, dan tanggung jawab terhadap konsekuensi tindakan. Kerangka tersebut merupakan sintesis analitis yang dikembangkan dalam artikel ini, bukan teori baku yang diasumsikan telah diterima secara seragam oleh seluruh tradisi pemikiran Islam. Tujuannya adalah menyediakan cara untuk menilai bagaimana suatu paradigma diterjemahkan menjadi alasan dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Integrasi Nilai Ketuhanan dan Rasionalitas

Nilai ketuhanan memberikan orientasi moral, sedangkan rasionalitas membantu manusia menjelaskan alasan dan menguji konsistensi tindakan. Hubungan keduanya memungkinkan prinsip keagamaan diterapkan dengan memperhatikan konteks dan keterbatasan pengetahuan.

Integrasi tersebut tidak berarti bahwa semua persoalan dapat diselesaikan melalui satu formula, tetapi menegaskan pentingnya proses berpikir yang terbuka terhadap evaluasi.

Dalam pendidikan, misalnya, nilai amanah dan keadilan dapat menjadi dasar untuk mengelola lembaga secara bertanggung jawab. Namun, penerapannya tetap memerlukan pertimbangan rasional mengenai distribusi kesempatan, penggunaan anggaran, kualitas layanan, dan dampak kebijakan bagi peserta didik. Dengan demikian, orientasi keagamaan dapat memberikan arah, sementara penalaran membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang dinyatakan.

2. Pemeriksaan Fakta dan Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab manusia mencakup kesediaan memahami kondisi nyata sebelum mengambil keputusan. Informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu justru menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pemeriksaan fakta, penggunaan pengetahuan yang relevan, dan evaluasi terhadap dampak menjadi bagian penting dari penerapan nilai moral.

Dalam kehidupan masyarakat, pertimbangan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi program bantuan sosial, kebijakan pendidikan, atau pengelolaan lingkungan. Penilaian perlu memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mengalami kerugian, serta apakah terdapat alternatif yang lebih adil. Proses ini juga memerlukan keterbukaan terhadap pengalaman pihak terdampak karena data agregat terkadang tidak menggambarkan seluruh persoalan yang dialami kelompok tertentu.

3. Keadilan, Kemaslahatan, dan Koreksi Keputusan

Keadilan dan kemaslahatan perlu digunakan untuk menilai konsekuensi suatu tindakan, bukan sekadar menjadi istilah pembenar bagi keputusan yang telah ditetapkan. Setiap keputusan perlu memperhitungkan distribusi manfaat dan kerugian, perlindungan hak, serta dampak jangka panjang. Ketika fakta baru muncul atau keputusan terbukti menimbulkan kerugian yang tidak diperkirakan, mekanisme evaluasi dan koreksi perlu tersedia.

Kerangka evaluasi ini tidak menjamin bahwa seluruh perbedaan moral akan terselesaikan. Perbedaan penafsiran, keterbatasan data, dan konflik kepentingan dapat tetap muncul. Namun, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik apabila dasar nilainya dijelaskan, penalarannya konsisten, fakta diperiksa, dan pihak terdampak diberi ruang untuk menyampaikan keberatan.

Secara keseluruhan, sintesis ini mengarahkan pembahasan dari pertanyaan mengenai paradigma mana yang harus menggantikan paradigma lain menuju pertanyaan tentang bagaimana suatu orientasi menghasilkan keputusan yang bermoral, rasional, dan adil. Teosentrisme tetap memberikan perhatian pada landasan transendental, sedangkan antroposentrisme menegaskan pentingnya martabat dan kondisi manusia. Keduanya perlu dievaluasi berdasarkan fungsi, batas, dan penerapannya tanpa menghilangkan perbedaan konseptual di antara keduanya.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penegasan bahwa hubungan Tuhan, akal, dan tanggung jawab manusia perlu dipahami melalui proses pertanggungjawaban yang mencakup landasan nilai, kualitas argumentasi, kecukupan bukti, dan konsekuensi etis. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar analisis untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan pemikiran Islam dalam pendidikan, hukum, kehidupan keagamaan, dan kebijakan sosial. Pengujian melalui studi kasus atau penelitian lapangan tetap diperlukan untuk mengetahui bagaimana kerangka konseptual tersebut bekerja dalam situasi konkret.

KESIMPULAN

Pergeseran paradigma teosentris menuju antroposentris merupakan persoalan filosofis yang perlu dipahami secara kritis dan proporsional, terutama dalam pemikiran Islam yang menempatkan hubungan Tuhan dan manusia sebagai bagian penting dari orientasi kehidupan. Teosentrisme menegaskan Tuhan sebagai pusat orientasi nilai dan landasan tanggung jawab moral, sedangkan antroposentrisme menekankan martabat, hak, kebutuhan, dan pengalaman manusia. Meskipun memiliki titik tekan yang berbeda, kedua paradigma tersebut tidak harus dipertentangkan secara mutlak. Teosentrisme tidak selalu berarti mengabaikan kepentingan manusia, sebagaimana antroposentrisme tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, persoalan mendasarnya bukan sekadar menentukan paradigma yang lebih unggul, melainkan memahami bagaimana nilai ketuhanan dan kepentingan kemanusiaan dapat dinilai serta diterapkan secara bertanggung jawab.

Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma teosentris memiliki kekuatan dalam menyediakan landasan moral yang melampaui kepentingan sesaat, sekaligus mengingatkan manusia akan keterbatasan, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Namun, penerapan nilai-nilai ketuhanan tetap melibatkan penafsiran manusia yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, konteks sosial, dan kepentingan tertentu. Sebaliknya, paradigma antroposentris memberikan perhatian penting terhadap martabat manusia, hak, kebebasan, dan persoalan konkret dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, orientasi yang berpusat pada manusia juga memerlukan batas etis agar kepentingan individu atau mayoritas tidak mengorbankan hak kelompok rentan dan keadilan bagi sesama. Dengan demikian, kedua paradigma perlu dievaluasi berdasarkan landasan nilai, kekuatan argumentasi, ketepatan pemahaman terhadap fakta, serta konsekuensi moral dan sosial dari penerapannya.

Artikel ini menegaskan bahwa hubungan Tuhan, akal, wahyu, dan tanggung jawab manusia perlu ditempatkan dalam kerangka yang saling melengkapi. Nilai ketuhanan memberikan orientasi moral, wahyu menjadi sumber pedoman keagamaan, akal berperan dalam memahami dan menimbang argumentasi, sedangkan pemeriksaan fakta membantu memastikan bahwa keputusan didasarkan pada keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh unsur tersebut perlu diarahkan pada kemaslahatan yang tidak hanya mempertimbangkan manfaat, tetapi juga keadilan, penghormatan terhadap hak, dan distribusi manfaat serta kerugian secara proporsional. Dalam perspektif pemikiran Islam, integrasi ini membuka ruang bagi pengembangan orientasi kemanusiaan tanpa harus memutuskan hubungan dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada saat yang sama, nilai agama tidak cukup berhenti pada pernyataan normatif, tetapi perlu diwujudkan melalui penalaran yang dapat dijelaskan, tindakan yang bertanggung jawab, dan kepedulian terhadap persoalan nyata manusia.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penegasan bahwa evaluasi pergeseran paradigma teosentris menuju antroposentris tidak seharusnya berhenti pada pertentangan antara Tuhan dan manusia. Evaluasi yang lebih mendalam perlu memperhatikan hubungan antara landasan moral, penalaran rasional, bukti faktual, dan konsekuensi etis dalam pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut memungkinkan pemikiran Islam merespons perubahan sosial dan tantangan modernitas secara terbuka tanpa kehilangan orientasi spiritualnya. Dengan demikian, pembaruan pemikiran Islam tidak harus dipahami sebagai perpindahan mutlak dari ketuhanan menuju kemanusiaan, melainkan sebagai upaya memperjelas bagaimana kesadaran ketuhanan, penggunaan akal, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat bekerja secara selaras. Kualitas suatu paradigma pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang dijadikannya sebagai pusat perhatian, tetapi juga oleh kemampuannya menghasilkan pemahaman yang argumentatif, keputusan yang adil, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan dan analisis konseptual sehingga belum menguji kerangka pemikiran yang ditawarkan melalui kasus empiris. Penelitian selanjutnya dapat menerapkan pendekatan ini pada bidang pendidikan, kebijakan publik, kesehatan, dan hukum Islam untuk mengkaji bagaimana nilai ketuhanan, penalaran rasional, bukti faktual, serta pertimbangan keadilan digunakan dalam praktik pengambilan keputusan. Kajian komparatif terhadap berbagai kasus juga diperlukan untuk memahami bagaimana perbedaan penafsiran memengaruhi tindakan dan pertanggungjawaban etis. Melalui pengujian tersebut, kerangka integratif yang diajukan dalam artikel ini dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari segi ketajaman konseptual maupun relevansinya dalam menjawab persoalan kontemporer. Pada akhirnya, hubungan Tuhan dan manusia dalam pemikiran Islam perlu dipahami bukan sebagai pertentangan yang harus dimenangkan salah satu pihak, melainkan sebagai persoalan etis dan filosofis yang menuntut keselarasan antara keyakinan, akal, kenyataan, keadilan, dan tanggung jawab manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Alfian, G. Latifah. 2025. *Dialektika Akal dan Wahyu: Pemikiran Filosofis Tentang Keimanan dan Ketuhanan dalam Islam*. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 337-45.
- Al-Ghazali. (1980). *Freedom and fulfillment: An annotated translation of al-Ghazali's al-Munqidh min al-Dalal and other relevant works* (R. J. McCarthy, Trans.). Twayne Publishers.
- Anwar, K., & Masuwd, M. A. (2026). Artificial Intelligence, Social Media, and Post-Truth: An Islamic Education Perspective. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 9(2), 245-264.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Berlin, I. (1969). *Four essays on liberty*. Oxford University Press.
- Brooke, J. H. (1991). *Science and religion: Some historical perspectives*. Cambridge University Press.
- Del Soldato, E. (2023). Natural philosophy in the Renaissance. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Fall 2023 ed.).
- Erawati, D. (2026). Ethnopedagogy in Social and Cultural Sciences: A Bridge between Cultural Identity, Local Values, and Contextual Learning. *Maneser: Journal of Religion, Spirituality, and Culture*, 1(1), 37-48.
- Griffel, F. (2026). Al-Ghazali. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Spring 2026 ed.).
- Haryadi, R., & Burhanuddin, N. (2026). The transformation of 'ilm al-kalām methodology: An epistemological shift from theocentrism to anthropocentrism in the context of modernity. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 6(1), 41–50.
- Ibn Rushd. (2001). *Decisive treatise and epistle dedicatory* (C. E. Butterworth, Trans.). Brigham Young University Press.

- Junaedi, M. (2018). Konstruksi pemikiran fikih Indonesia: Pergeseran dari teosentrisme ke antroposentrisme. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 18(1), 4–30.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kant, I. (1998). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785)
- Latifah, L., & Ngilimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: Jurnal Sains & Teknologi*, 1(02), 51-64.
- Latifah, L., & Normuslim, N. (2026). Ibn Rushd's Epistemology and Its Relevance to the Contemporary Islamic Education Curriculum. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah*, 3(1), 29-40.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngilimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- MacIntyre, A. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- Mahtir, S., Fathorrahman, Hidayat, A., Azka, I., & Haramain, F. B. (2025). From theocentric to anthropocentric: Reconfiguring tawhīd in contemporary Islamic thought. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 10(1), 107–126.
- Marwiyah, S., & Syam, N. (2026). INTEGRASI ILMU KEISLAMAN DI ERA KONTEMPORER GLOBAL: PENDEKATAN INTERDISIPLINER MELALUI KOMUNIKASI DAN SOSIOLINGUISTIK. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 70-81.
- Nasr, S. H. (1989). *Knowledge and the sacred*. State University of New York Press.
- Ngilimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngilimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ngilimun, N., Noortyani, R., & Hermawan, S. (2025). Nilai Religi dalam Tradisi Lisan Sansana Dayak Ngaju. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(1), 426-440.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Sachedina, A. (2009). *Islam and the challenge of human rights*. Oxford University Press.
- Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). Perkembangan Sains Dan Teknologi Dalam Perspektif Agama. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 33-39.
- Taylor, C. (1989). *Sources of the self: The making of the modern identity*. Harvard University Press.
- Taylor, C. (2007). *A secular age*. Harvard University Press.
- Wijaya, A. (2020). An argument for Islamic anthropocentrism (from taklifi reasoning to humanright reasoning). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(3), 487–500.